



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PT INALUM MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN SMELTER

Juli Panglima Saragih
Analisis Legislatif Ahli Madya
juli.saragih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Presiden Joko Widodo secara resmi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2022 dan PP Nomor 46 Tahun 2022 terkait dengan *split-off* PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum) dari Mining Industry Indonesia (MIND ID). Pemisahan entitas tersebut diyakini bisa membuat PT Inalum dan MIND ID lebih fokus mengerjakan tugasnya, khususnya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pertambangan di dalam negeri. Bagi PT Inalum, pemisahan tersebut bakal berdampak positif terhadap upaya penghiliran, khususnya peningkatan nilai tambah produk aluminium (alumina) di dalam negeri. Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso, mengatakan bahwa PT Inalum nantinya dapat berfokus untuk menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan smelter terkait dengan upaya peningkatan kapasitas pengolahan serta produksi aluminium karena selama ini sebagian kebutuhan aluminium di dalam negeri masih bergantung pada impor. PT Inalum akan dapat berfokus pada operasional dan produksi, dalam hal ini pengelolaan pabrik peleburan aluminium dan produksi aluminium yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Pengambilan saham dilaksanakan lewat pengurangan modal negara untuk PT Inalum sebesar Rp48,74 triliun yang tersebar di portofolio saham perusahaan pelat merah di PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam (ANTM), PT Timah Tbk. (TINS), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan PT Freeport Indonesia. Pengalihan portofolio itu mengakibatkan kepemilikan saham negara pada ANTM menjadi sebesar 65% atau sebesar Rp1,56 triliun, kepemilikan TINS menjadi 65% atau sebesar Rp242,05 miliar, kepemilikan PTBA menjadi 65,02% atau sebesar Rp749,04 miliar, dan kepemilikan PT Freeport Indonesia sebesar 5,62% atau sebanyak USD2,13 juta yang terdiri atas 21.300 saham dengan nilai nominal sebesar USD100. Dengan demikian, PT Inalum sekarang sejajar kembali dengan ketiga BUMN tersebut, dengan catatan bahwa kepemilikan negara di PT Inalum tetap sebesar 100%, sedangkan di tiga BUMN lain hanya sekitar 65%. Penerbitan kedua PP di atas merupakan salah satu rangkaian langkah akhir dalam pembentukan *holding* industri pertambangan yang selama ini beridentitas MIND ID. Selain itu, PT Inalum juga akan menjadi bagian dari MIND ID, seperti PTBA, PT Antam, dan PT Timah, yang berfokus pada pengoperasian smelter aluminium dan juga pengembangan penghiliran rantai nilai aluminium.

PT Inalum juga diminta menyelesaikan proyek smelternya yang ada di Kalimantan Barat segera mungkin, karena sudah terlalu lama tidak terselesaikan. Kapasitas produksi PT Inalum yang hanya 250.000 ton per tahun bisa dilipatgandakan segera. Sudah hampir 50 tahun kapasitas produksi PT Inalum tidak bertambah, sedangkan Press Metal Malaysia yang baru hadir kurang dari 10 tahun sudah tiga kali lipatnya. Pakar BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menilai positif komitmen pemerintah untuk meneruskan *split-off* PT Inalum dari MIND ID. Seperti diketahui, produksi bijih bauksit di Indonesia mencapai angka 26,3 juta ton setiap tahunnya. Hanya saja, sebagian besar produksi itu harus diekspor karena fasilitas pengolahan lebih lanjut di dalam negeri tidak tersedia. Setiap tahunnya, bijih bauksit yang dipasok ke dalam negeri untuk pengolahan alumina berada di kisaran 1,74 juta ton. Lewat bijih bauksit itu,

produksi alumina, baik jenis *chemical grade alumina* (CGA) dan *smelter grade alumina* (SGA) dapat mencapai 1,17 juta ton. Kendati demikian, sebagian besar produksi alumina harus diekspor karena belum tersedianya industri lanjutan produk tersebut di dalam negeri. Berdasarkan data Kementerian ESDM per tahun 2021, baru ada tiga smelter yang beroperasi dengan kapasitas input bijih bauksit secara keseluruhan 4,56 juta ton. Ketiga smelter itu adalah milik PT Indonesia Chemical Alumina dengan kapasitas *output* 300.000 CGA, PT Well Harvest Winning berkapasitas 1 juta SGA, dan PT Inalum dengan kapasitas 250.000 aluminium ingot dan *billet*.

Atensi DPR

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2022 dan Nomor 46 Tahun 2022 terkait dengan *split-off* PT Inalum dari MIND ID, pemerintah optimis akan ada peningkatan kapasitas produksi alumina dan produk-produk hilir (lanjutan) dari alumina. Nilai tambah produk alumina ini dihasilkan dari proses smelter yang akan dipercepat pembangunannya oleh PT Inalum. DPR RI khususnya Komisi VII DPR RI perlu mengawasi proses percepatan pembangunan smelter yang dilakukan oleh PT Inalum untuk meningkatkan nilai tambah produk aluminium (alumina), yang saat ini sebagian produk alumina (ingot dan *billet*) masih diekspor. Kedua produk ini seharusnya dapat diolah lagi di fasilitas smelter sehingga dapat diperoleh nilai tambah lebih tinggi.

Sumber

Bisnis Indonesia, 12 Desember 2022; dan
industri.kontan.co.id, 13 Desember 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Dian Cahyaningrum
Nidya Waras Sayekti
Edmira Rivani
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.